

## KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok.	Un.01-B.II-KEU -SUB.VER-SOP- 007
Tgl. Terbit	1 Oktober 2013
No.Revisi	000
Hlm.	1   2

## SOP VERIFIKASI PENGAJUAN DANA RM OPERASIONAL

#### 1. TUJUAN

Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:

Menjelaskan proses verifikasi pengajuan dana RM Operasional pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### 2. RUANG LINGKGUP

Standard Operating Procedure (SOP) ini meliputi:

Aktivitas prosedur verifikasi pengajuan dana RM Operasional pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## 3. REFERENSI

- 1. Pedoman Mutu
- 2. Peraturan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. Un.02/R/HK.00.5/2/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja DIPA Bidang Rupiah Murni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

## 4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Verifikasi pengajuan dana RM Operasional adalah memeriksa kebenaran dan kesesuaian atas tarif pengajuan dana RM Operasional dengan aturan yang berlaku (Standar Biaya dan RBA).
- b. Badan Layanan Umum (BLU)
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- d. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
- e. Surat Perintah Membayar (SPM)
- f. Buku Kas Umum (BKU)

#### 5. DOKUMEN YANG TERKAIT/REKAMAN MUTU/FORM

- a. Dokumen permohonan pengajuan dana
- b. Nota Verifikasi

#### 6. INSTRUKSI KERJA

a. -

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 Tentang	a. Minimal Lulusan SLTA/Sederajat
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	b. Dapat mengoperasikan komputer
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 42/PMK.05/2008 Tentang	dengan baik (Ms. Word dan Excel)
Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta	c. Tekun dan Teliti
pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang	
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	
(BLU)	
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang	
Tata Cara Penata Usahaan dan Penyapaian Laporan	
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian	
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja	
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2012 Tentang	
Standar Biaya Tahun 2013	
5. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang	
Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran	
Pendapatan dan Belanja Negara	
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per	
47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan	
Penyusunan Laporan Peranggungjawaban Bendahara	
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
a. BPP RM Operasional	a. Komputer



## KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok.	Un.01-B.II-KEU -SUB.VER-SOP-007
Tgl. Terbit	1 Oktober 2013
No.Revisi	000
Hlm.	2   2

# SOP VERIFIKASI PENGAJUAN DANA RM OPERASIONAL

b. PPK APBN	b. Berkas Pengajuan Dana		
c. Kabag. Keuangan	c. Nota Verifikasi		
d. Kasubbag Pelaksanaan dan Verifikasi Anggaran			
e. Verifikator			
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:		
Apabila Berkas Pengajuan Dana tidak sesuai dengan persyaratan	Buku Kas Umum (BKU)		
maka dana tersebut tidak dapat dicairkan			

				PELAKSANA			MUTU BAKU		
No	AKTIVITAS	Bagian Pada Rektorat	Kabag Keuangan	Kasubbag Pelaksanaan dan Verifikasi Anggaran	Kasubbag Perbendah araan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai								
2	Dokumen pengajuan dana RM Operasional	1				Berkas Pengajuan Dana			
3	Memeriksa dokumen pengajuan dana RM Operasional					Berkas Pengajuan Dana dan Disposisi			
4	Memeriksa dokumen pengajuan dana RM Operasional					Berkas Pengajuan Dana dan Disposisi			
5	Disetujui?			ya		Disposisi			
6	Menerima Dokumen pengajuan dana RM Operasional dan memberikan disposisi untuk diproses di Subbag Perbendaharaan					Dokumen dan disposisi			
7	Selesai								